



## TERM OF REFERENCE (TOR)

# TAKE THE LEAD webtalk PINDAHAN IBU KOTA: BAGAIMANA NASIB JAKARTA?

## TENTANG TAKE THE LEAD webtalk

\_\_ adalah sebuah webtalk bulanan yang diproduksi oleh Institut Harkat Negeri sebagai salah satu kanal untuk mendekatkan nilai-nilai dan karakter kepemimpinan dalam praktik, berdurasi 40-60 menit, TAKE THE LEAD webtalk mengundang para pemimpin untuk membahas kepemimpinan dalam spektrum berbeda yang disesuaikan dengan subtema tertentu. TAKE THE LEAD webtalk bersifat terbuka untuk umum dan diselenggarakan di setiap akhir bulan.

## DEMOGRAFI PEMIRSA

18-60 tahun, berbahasa Indonesia, dan tertarik dengan isu kepemimpinan dan/atau subtema yang diangkat.

## PENGANTAR

Tema	: Pindahan Ibu Kota
Subtema	: Nasib Jakarta setelah tidak lagi jadi ibu kota
Tanggal	: 30 Juni 2024

---

Dua puluh dua Juni kemarin Jakarta merayakan ulang tahunnya yang ke-497, merupakan tahun terakhir megapolitan yang dulunya bernama Sunda Kelapa ini sebagai ibu kota. Sejak tahun 1.400 tempat ini selalu diperebutkan oleh asing karena lokasi geografis yang sangat strategis pada geografi dunia. Labuhan pusat Kerajaan Sunda ini kemudian diminati sebagai sentra pemerintahan dari jaman kolonial hingga saat ini. Sedari dulu tempat ini menjadi pusat (mencari) penghidupan yang layak bagi para perantau. Kota yang dulunya diawali dari muara kecil kali Ciliwung, dalam 600 tahun telah menjadi salah satu dari kota berpengaruh dan menjadi bagian sejarah dunia. Daulat panggilan ibu kota menjadi penghargaan tertinggi kota ini dalam enam abad. Sebentar lagi sebutan *ibu kota* akan dicabut sebab perlakuan alam tidak lagi seperti sahabat.

Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur menghadirkan berbagai dampak multidimensi yang perlu dikaji secara mendalam. Sebagai tempat pusat pemerintahan Jakarta dapat memanfaatkan kembali Barang Milik Negara (BMN) yang ditinggalkan. Menurut Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu RI, Encep Sudarwan, nilai BMN pemerintah pusat yang ada di Jakarta mencapai Rp 1.640 triliun. Nilai tersebut mencakup dua hal: BMN sebagai kantor pusat kementerian dan lembaga dan BMN sebagai kantor perwakilan kementerian dan lembaga. Kemenkeu tengah melakukan kajian dan rencana untuk menentukan nasib gedung dan kantor pemerintah pusat pada BMN dengan total nilai Rp 300 triliun ini.

Pemindahan ibu kota terhadap Jakarta memberikan penurunan PDB riil Jakarta sebesar minus 7,07% pada *business as usual*. Hal ini berpotensi untuk memberikan pengaruh terhadap serapan tenaga kerja yang juga berkurang sebesar minus 5,31%. Jakarta menjadi barometer pertumbuhan perekonomian secara nasional.



Setelah mengalami resesi selama tiga kuartal berturut-turut sejak 2020-2023, Jakarta masih berusaha memulihkan dampak Pandemi COVID-19. Industri ritel dan sektor ritel non-formal yang menjadi mesin pemutar roda ekonomi Jakarta masih optimis pada pertumbuhan ekonomi Jakarta sebab kinerja konsumsi rumah tangga Jakarta cenderung stabil meningkat 1.8% setiap tahunnya. Diprediksi oleh Kepala Perwakilan BI untuk DKI Jakarta, pasca pindahan ibu kota Jakarta masih akan bertumbuh sebesar 4,8-5,6%.

Dilansir dari situs resmi konsultan keuangan internasional PricewaterhouseCoopers (PwC), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah-langkah mitigasi bersama PwC untuk mengurangi dampak negatif ini dan mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi baru, dengan tujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi regional. Langkah-langkah ini meliputi pemberian insentif bagi sektor swasta, pengembangan infrastruktur lokal, dan peningkatan investasi di sektor-sektor yang masih potensial di Jakarta.

Relokasi ibu kota ini memiliki potensi untuk menurunkan emisi karbon guna meningkatkan kualitas udara di Jakarta yang sekarang mendapat predikat kota dengan kualitas udara terburuk ketiga di seluruh dunia. Menanggapi tentang kabut di udara Jakarta tahun lalu, KemenKLHK melihat polusi di Jakarta disebabkan oleh transportasi sebesar 96,36%, energi 1,76%, manufaktur industri 1,25%. Pada masing-masing peranan, transportasi motor bahan bakar bensin mengambil kontribusi terbesar sebagai penyebab buruknya udara Jakarta. Tak hanya polusi udara, belum lagi membahas tentang banjir yang tak lagi tak terprediksi dan sampah akibat gaya hidup konsumtif yang hingga sekarang belum pula ada obatnya.

Menyentuh sisi kesejahteraan sosial masyarakat Jakarta pasca pemindahan ibu kota, perlu upaya yang berfokus pada beberapa aspek kunci, termasuk memastikan akses terhadap perumahan layak dan kebutuhan dasar yang memadai, menyediakan sistem transportasi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan, serta meningkatkan tata kelola urbanisasi yang inklusif. Warisan budaya dalam identitas Jakarta sebagai kota global nantinya juga perlu dilindungi. Membuat aksi-aksi penanggulangan perusakan dan pelestarian alam juga harus menjadi prioritas, sambil meminimalisir dampak lingkungan akibat industri untuk perbaikan kualitas udara, air, dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kolaborasi dengan *startup* digital berpotensi memperkuat layanan publik melalui inovasi teknologi yang efektif dan inklusif.

---

[Pindah ke IKN, Nasib Gedung Pemerintah di Jakarta Belum Jelas](#)

[Hitungan Pemerintah soal Dampak Ekonomi Pemindahan Ibu Kota Negara | kumparan.com](#)  
1100 (dpr.go.id)

[sipinter-348-870-20200706172138.pdf \(dpr.go.id\)](#)

[6 Alasan Ibu Kota Negara Pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur \(kompas.com\)](#)

[Sederet Dampak Ekonomi Pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara - Bisnis Liputan6.com](#)

[Prediksi Nasib Ekonomi Jakarta setelah Ibu Kota Pindah ke IKN \(bisnis.com\)](#)

[Terungkap! Ini Fakta Penyumbang Terbesar Polusi Udara Jakarta](#)

[Polusi Udara Jakarta Tertinggi ke-3 Dunia Versi IQ Air Hari Ini](#)

<https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2023/indonesian/begini-nasib-ekonomi-jakarta-jika-tak-lagi-jadi-ibu-kota.html>

---

## PEMBAHASAN KUNCI

SEGMENT	BAHASAN	DURASI

